



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/1016/KPTS/013/2022

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2023-2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2023-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengembangkan teknologi informasi selama periode tahun 2023-2024.

KETIGA: . . .

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2022



KHOFFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/1016/KPTS/013/2022
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DAN PETA
RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE TAHUN 2023-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Presiden tersebut dibuat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dengan dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Peraturan Presiden tersebut juga dibuat dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan dukungan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan perencanaan arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE yang perlu direncanakan meliputi Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Infrastruktur SPBE, Arsitektur Aplikasi SPBE, Arsitektur Keamanan SPBE, dan Arsitektur Layanan SPBE.

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud

Maksud dari pembuatan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini adalah memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan dan implementasi bagi pengembangan SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang komprehensif, efisien, efektif dan terpadu, dalam bentuk:

- Arsitektur SPBE yang terdiri dari:
 - Arsitektur Proses Bisnis;
 - Arsitektur Data dan Informasi;
 - Arsitektur Aplikasi SPBE;
 - Arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - Arsitektur Keamanan SPBE;;
 - Arsitektur Layanan SPBE.
- Peta Rencana SPBE yang terdiri dari:
 - Peta Rencana Tata Kelola SPBE;
 - Peta Rencana Manajemen SPBE;;
 - Peta Rencana Layanan SPBE;
 - Peta Rencana Infrastruktur SPBE;
 - Peta Rencana Aplikasi SPBE;
 - Peta Rencana Keamanan SPBE; dan
 - Peta Rencana Audit TIK SPBE.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari pembuatan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE ini adalah:

- a) Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b) Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif;
- c) Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan; dan
- d) Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi selama periode 2023-2024.

1.3. METODOLOGI

Metodologi yang dipergunakan dalam penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini terdiri dari:

1. Persiapan pekerjaan;
2. Sosialisasi pelaksanaan penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di seluruh perwakilan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Pendampingan penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE;;
4. Monitoring progress penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE;
5. Penyusunan laporan arsitektur SPBE; dan
6. Penyusunan laporan peta rencana SPBE.

1.4. TARGET PENGEMBANGAN SPBE PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

1.4.1. Tata Kelola SPBE

Inisiatif Strategis pengembangan SPBE untuk kategori Tata Kelola SPBE, terdiri dari:

- a. Reviu Kebijakan SPBE, meliputi:
 - Reviu Kebijakan Internal Arsitektur SPBE;;
 - Reviu Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE;
 - Reviu Kebijakan Internal Manajemen Data;
 - Reviu Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE;
 - Reviu Kebijakan Internal Layanan Pusat Data;
 - Reviu Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah;
 - Reviu Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan;
 - Reviu Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi;
 - Reviu Kebijakan Internal Audit TIK; dan
 - Reviu Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. Reviu Peta Rencana SPBE;
- c. Reviu Arsitektur SPBE;
- d. Reviu Kebijakan/SOP manajemen SPBE, meliputi:
 - Reviu Kebijakan/SOP manajemen risiko;
 - Reviu Kebijakan/SOP manajemen keamanan informasi;
 - Reviu Kebijakan/SOP manajemen data;
 - Reviu Kebijakan/SOP manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - Reviu Kebijakan/SOP manajemen sumber daya manusia;
 - Reviu Kebijakan/SOP manajemen pengetahuan;
 - Reviu Kebijakan/SOP manajemen perubahan; dan

- Reviu Kebijakan/SOP manajemen Layanan SPBE;
- e. Reviu Tim Pengelola Aplikasi pada masing-masing perangkat daerah pengelola aplikasi; dan
- f. Melaksanakan Forum Kolaborasi SPBE, Evaluasi dan Optimalisasi pelaksanaan Kolaborasi SPBE.

1.4.2. Manajemen SPBE

Inisiatif Strategis pengembangan SPBE untuk kategori Manajemen SPBE antara lain:

a. Manajemen Risiko SPBE

Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membentuk Komite Manajemen Risiko SPBE serta melaksanakan Evaluasi dan Optimalisasi Penerapan Manajemen Risiko SPBE di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023-2024.

b. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk Tim Respon Insiden Keamanan Komputer yang akan melaksanakan Evaluasi dan Optimalisasi Penerapan Manajemen Keamanan Informasi SPBE pada tahun 2023-2024 berdasarkan manajemen risiko.

c. Manajemen Data

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan Evaluasi dan Optimalisasi Penerapan Manajemen Data pada tahun 2023-2024.

d. Manajemen Aset TIK

Manajemen aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan Evaluasi dan Optimalisasi Penerapan Manajemen Aset TIK pada tahun 2023-2024.

e. Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE

Manajemen sumber daya manusia SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan Evaluasi dan Optimalisasi Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE pada tahun 2023-2024. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE meliputi peningkatan kapasitas di bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE.

f. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan Evaluasi dan Optimalisasi Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE pada tahun 2023-2024 melalui aplikasi manajemen pengetahuan.

g. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan Evaluasi dan Optimalisasi Penerapan Manajemen Perubahan SPBE pada tahun 2023-2024.

h. Manajemen Layanan SPBE

Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.

Pelayanan Pengguna SPBE merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE. Pelayanan Pengguna SPBE dilakukan melalui aplikasi ticketing. Pengoperasian Layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. Pengelolaan Aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan Evaluasi dan Optimalisasi Penerapan Manajemen Layanan SPBE pada tahun 2023-2024.

1.4.3. Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)

Inisiatif Strategis pengembangan SPBE untuk kategori Audit TIK antara lain :

- Audit Aplikasi SPBE
- Audit Infrastruktur SPBE
- Audit Keamanan SPBE

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada penerapan tata kelola dan manajemen TIK, fungsionalitas TIK, kinerja TIK yang dihasilkan dan aspek TIK lainnya.

Audit TIK dilaksanakan pada tahun 2023-2024 oleh Tim Audit Internal dan Tim Audit Eksternal.

1.4.4. Layanan SPBE

Inisiatif Strategis pengembangan SPBE untuk kategori Layanan SPBE antara lain:

- Survey Pengguna SPBE
 - Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE;
 - Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan; dan
 - Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah.
- Evaluasi dan Optimalisasi Pemanfaatan portal pengaduan layanan publik <https://jatim.lapor.go.id/>

1.4.5. Aplikasi SPBE

Inisiatif Strategis pengembangan SPBE untuk kategori Aplikasi antara lain:

1. Pengembangan Aplikasi Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan
Pengembangan aplikasi sesuai dengan proses bisnis, tugas dan fungsi perangkat daerah serta mengutamakan integrasi Proses Bisnis, integrasi data, integrasi Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE serta berpedoman pada kebijakan pengembangan aplikasi yang berlaku.
2. Evaluasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi
Evaluasi dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna serta kebijakan yang berlaku

1.4.6. Infrastruktur SPBE

Inisiatif Strategis pengembangan SPBE untuk kategori Infrastruktur SPBE antara lain:

1. Layanan Pusat Data
 - Peningkatan kapasitas pusat data
 - Integrasi dengan Pusat Data Nasional
 - *Disaster Recovery Center* (DRC)
 - Pemeliharaan pusat data
 - Evaluasi dan Optimalisasi Layanan Pusat Data

- 2. Layanan Jaringan Intra Pemerintah
Pengembangan, Evaluasi dan Optimalisasi Layanan Jaringan Intra Pemerintah
- 3. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Evaluasi dan Optimalisasi Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- 4. Fasilitas Jaringan Internet
Evaluasi dan Optimalisasi Layanan Fasilitas Jaringan Internet
- 5. Pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras pendukung administrasi perkantoran

1.4.7. Keamanan SPBE

Inisiatif Strategis pengembangan SPBE untuk kategori Audit TIK antara lain :

- 1. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE
- 2. Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE
- 3. Kelaikan Keamanan Aplikasi Khusus dan Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Provinsi Jawa Timur
- 4. Penanganan Insiden Keamanan SPBE
- 5. Peningkatan Keamanan SPBE
- 6. Penyusunan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
- 7. Operasional SOC
- 8. PAM sinyal dan Kontra Penginderaan (VIP)

1.4.8. Ringkasan Peta Rencana SPBE

Tabel 1 Peta Rencana SPBE

NO	INISIATIF STRATEGIS	KELUARAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANAAN	
				2023	2024
1	2	3	4	5	6
I.	TATA KELOLA				
	Reviu Kebijakan SPBE	Reviu Kebijakan Internal Arsitektur SPBE	Biro Hukum, Dinas Kominfo, Biro Organisasi, BAPPEDA	√	√
		Reviu Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE	Biro Hukum, Dinas Kominfo, BAPPEDA	√	√

1	2	3	4	5	6
		Reviu Kebijakan Internal Manajemen Data	Biro Hukum, Dinas Kominfo, BAPPEDA	√	√
		Reviu Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	Biro Hukum, Dinas Kominfo	√	√
		Reviu Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	Biro Hukum, Dinas Kominfo	√	√
		Reviu Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah	Biro Hukum, Dinas Kominfo	√	√
		Reviu Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Biro Hukum, Dinas Kominfo	√	√
		Reviu Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	Biro Hukum, Dinas Kominfo	√	√
		Reviu Kebijakan Internal Audit TIK	Biro Hukum, Dinas Kominfo, Inspektorat	√	√
		Reviu Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Biro Hukum, Dinas Kominfo, Biro Organisasi	√	√
	Reviu Kebijakan/SOP manajemen SPBE	Reviu Kebijakan/SOP manajemen risiko	Dinas Kominfo, Biro Organisasi BAPPEDA	√	√
		Reviu Kebijakan/SOP manajemen keamanan informasi	Dinas Kominfo, Biro Organisasi BAPPEDA	√	√
		Reviu Kebijakan/SOP manajemen data	Dinas Kominfo, bappeda	√	√

1	2	3	4	5	6
		Reviu Kebijakan/SOP manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi	Dinas Kominfo, BPKAD	√	√
		Reviu Kebijakan/SOP manajemen sumber daya manusia	BKD, BPSDM, Dinas Kominfo	√	√
		Reviu Kebijakan/SOP manajemen pengetahuan	Dinas Kominfo	√	√
		Reviu Kebijakan/SOP manajemen perubahan	Biro Organisasi, Dinas Kominfo	√	√
		Reviu Kebijakan/SOP manajemen Layanan SPBE	Biro Organisasi, Dinas Kominfo	√	√
	Reviu Tim Pengelola Aplikasi	Reviu Tim Pengelola Aplikasi	Semua Perangkat Daerah	√	√
	Forum Kolaborasi SPBE	Forum Kolaborasi SPBE	Dinas Kominfo, Biro Organisasi	√	√
	Evaluasi dan Optimalisasi pelaksanaan Kolaborasi SPBE	Evaluasi dan Optimalisasi pelaksanaan Kolaborasi SPBE	Dinas Kominfo, Biro Organisasi	√	√
II.	MANAJEMEN SPBE				
	Manajemen Risiko	Evaluasi dan Optimalisasi pelaksanaan manajemen risiko	Inspektorat, Dinas Kominfo	√	√
	Manajemen Keamanan Informasi	Evaluasi dan Optimalisasi pelaksanaan manajemen risiko	Dinas Kominfo	√	√

1	2	3	4	5	6
	Manajemen Data	Evaluasi dan Optimalisasi pelaksanaan manajemen risiko	BAPPEDA, Dinas Kominfo	√	√
	Manajemen Asset TIK	Evaluasi dan Optimalisasi pelaksanaan manajemen risiko	BPKAD, Dinas Kominfo	√	√
	Manajemen Sumber Daya Manusia	Evaluasi dan Optimalisasi pelaksanaan manajemen risiko	BKD, BPSDM, Dinas Kominfo	√	√
	Manajemen Pengetahuan	Evaluasi dan Optimalisasi pelaksanaan manajemen risiko	Dinas Kominfo	√	√
	Manajemen Perubahan	Evaluasi dan Optimalisasi pelaksanaan manajemen risiko	Biro Organisasi, Dinas Kominfo	√	√
	Manajemen Layanan	Evaluasi dan Optimalisasi pelaksanaan manajemen risiko	Biro Organisasi, Dinas Kominfo	√	√
III.	AUDIT TIK				
	Audit Aplikasi SPBE	Audit Aplikasi SPBE	Dinas Kominfo, Inspektorat	√	√
	Audit Infrastruktur SPBE	Audit Infrastruktur SPBE	Dinas Kominfo, Inspektorat	√	√
	Audit Keamanan SPBE	Audit Keamanan SPBE	Dinas Kominfo, Inspektorat	√	√

1	2	3	4	5	6
IV.	LAYANAN SPBE				
	Survey Pengguna SPBE	Survey Kepuasan Pengguna Layanan SPBE	Biro Organisasi, Dinas Kominfo	√	√
	Evaluasi dan Optimalisasi Pemanfaatan portal pengaduan layanan publik	Evaluasi dan Optimalisasi https://jatim.lapor.go.id/	Dinas Kominfo	√	√
V.	APLIKASI SPBE				
	Pengembangan Aplikasi Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan	Pengembangan aplikasi sesuai dengan proses bisnis, tugas dan fungsi perangkat daerah serta mengutamakan integrasi Proses Bisnis, integrasi data, integrasi Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE serta berpedoman pada kebijakan pengembangan aplikasi yang berlaku.	Semua Perangkat Daerah	√	√
	Evaluasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi	Evaluasi dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna serta kebijakan yang berlaku	Semua Perangkat Daerah	√	√
VI.	INFRASTRUKTUR SPBE				
	Layanan Pusat Data	Peningkatan kapasitas pusat data	Dinas Kominfo	√	√
		Integrasi dengan Pusat Data Nasional	Dinas Kominfo	√	√

1	2	3	4	5	6
		Disaster Recovery Center (DRC)	Dinas Kominfo	√	√
		Pemeliharaan pusat data	Dinas Kominfo	√	√
		Evaluasi dan Optimalisasi Layanan Pusat Data	Dinas Kominfo	√	√
	Layanan Jaringan Intra Pemerintah	Pengembangan, Evaluasi dan Optimalisasi Layanan Jaringan Intra Pemerintah	Dinas Kominfo	√	√
	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Evaluasi dan Optimalisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Dinas Kominfo	√	√
	Fasilitasi Jaringan Internet	Evaluasi dan Optimalisasi Layanan Fasilitasi Jaringan Internet	Semua Perangkat Daerah	√	√
	Pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras pendukung administrasi perkantoran	Pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras pendukung administrasi perkantoran	Semua Perangkat Daerah	√	√
	Fasilitasi Jaringan Listrik, Genset	Fasilitasi Jaringan Listrik, Genset	Semua Perangkat Daerah	√	√
VII.	KEAMANAN SPBE				
	Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Sosialisasi, Workshop, Bimtek	Dinas Kominfo, BPSDM	√	√

1	2	3	4	5	6
	Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Dinas Kominfo	√	√
		Monitoring Keamanan Informasi	Semua Perangkat Daerah	√	√
	Kelaikan Keamanan Aplikasi Khusus dan Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Provinsi Jawa Timur	Kelaikan Keamanan Aplikasi Khusus dan Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Provinsi Jawa Timur	Dinas Kominfo	√	√
	Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Dinas Kominfo	√	√
	Peningkatan Keamanan SPBE	Peningkatan Keamanan SPBE	Dinas Kominfo	√	√
	Penyusunan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Penyusunan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Dinas Kominfo	√	√
	Operasional SOC	Operasional SOC	Dinas Kominfo	√	√
	PAM sinyal dan Kontra Penginderaan (VIP)	PAM sinyal dan Kontra Penginderaan (VIP)	Dinas Kominfo	√	√